

**SKRIPSI**  
**PENGUATAN PERAN BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM PROSES**  
**PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**  
**Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**Oleh:**

**Ahmad Sahal Alamsyah**

**2021100503110079**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUATAN PERAN BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM PROSES  
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)**

Diajukan Oleh:

**AHMAD SAHAL ALAMSYAH**  
202110050311079

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Rabu / 26 Februari 2025*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

  
**Muhammad Kamil, S.IP., MA**

Pembimbing

  
**Muhammad Kamil, S.IP., MA**

Mengetahui

  
Wakil **FISIP UMM**  
**Nasriddin M. Wahid, S.IP., M.Hub.Int.**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI




Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Ahmad Sahal Alamsyah**  
**202110050311079**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan  
Pada hari Rabu, 26 Februari 2025  
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. **Muhammad Kamil, S.IP., M.A** (  )
2. **Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A** (  )
3. **Dr. Saiman, M.Si.** (  )

Mengetahui  
Wakil Dekan  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Najamuddin Mujiarsoyal, S.IP., M.Hub.Int.**

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sahal Alamsyah  
NIM : 202110050311079  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :  
Penguatan Peran Badan Legislasi DPR RI dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekereasan Seksual (TPKS) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Ahmad Sahal Alamsyah

## SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



### LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144  
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

#### SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Ahmad Sahal Alamsyah  
NIM : 202110050311079  
Judul TA/Skripsi : Penguatan Peran Badan Legislatif DPR RI dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)  
Pembimbing : Muhammad Kamil, S.IP., MA

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	10%	8%	14%	5%	0%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd.

Malang, 18 Februari 2025  
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



Muhammad Kamil, S.IP., MA

Ahmad Sahal Alamsyah, 202110050311079. **Penguatan Peran Badan Legislasi DPR RI dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**. Dosen Pembimbing Muhammad Kamil, S.IP., MA.

---

## ABSTRAK

Badan Legislasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan Undang-Undang, salah satunya adalah UU TPKS. Penyusunan UU TPKS memiliki proses yang panjang dan sulit, penuh dengan kontroversi, dan memerlukan 10 tahun untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Pada kenyataannya, pengesahan UU TPKS sangat penting untuk pemerintah dalam menanggapi tuntutan masyarakat akan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Badan Legislasi dalam fungsinya adalah sebagai lembaga yang merencanakan dan memulai pembentukan Undang-Undang. Maka itu, penting untuk dapat melihat penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses penyusunan UU TPKS. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasannya benturan peran terjadi karena adanya perbedaan kepentingan politik, teknis, dan publik. Badan Legislasi DPR RI menghadapi konflik peran antara memenuhi ekspektasi kelompok pro (perlindungan maksimal terhadap korban) dan kelompok kontra (pemeliharaan nilai budaya dan agama). Dalam hal tersebut, perlunya peningkatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam memperkuat dialog yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak secara proporsional dan memastikan bahwa kepentingan korban tidak terabaikan dalam kompromi politik.

**Kata kunci: Peran Badan Legislasi DPR RI, Proses Legislasi, Penyusunan Undang-Undang, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Ahmad Sahal Alamsyah, 202110050311079. **Strengthening the Role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives in the Process of Drafting Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS).**  
Supervisor Muhammad Kamil, S.IP., MA.

---

### ***ABSTRACT***

*The Legislature has a very important role in the process of drafting laws, one of which is the TPKS Law. The drafting of the TPKS Law has a long and difficult process, full of controversies, and took 10 years to be enacted as a law. In reality, the enactment of the TPKS Law is very important for the government in responding to the public's demand regarding the many cases of sexual violence occurring in society. The Legislature, in its function, is an institution that plans and initiates the formation of laws. Therefore, it is important to examine the strengthening of the role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives in the process of drafting the Sexual Violence Crime Law. This research uses a qualitative descriptive method to delve into the role of the Legislative Body of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in the process of drafting the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS). The research findings indicate that role conflicts occur due to differences in political, technical, and public interests. The Legislature of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) faces a role conflict between meeting the expectations of the pro group (maximum protection for victims) and the contra group (preservation of cultural and religious values). In this regard, there is a need to enhance the role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in strengthening inclusive dialogue by involving various parties proportionally and ensuring that the interests of victims are not neglected in political compromises.*

***Keywords: Role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives, Legislative Process, Law Drafting, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho, rahmat dan anugerah-Nya yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penguatan Peran Badan Legislasi DPR RI Dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”** bisa diselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan pembuka gerbang cahaya bagi para umatnya hingga akhir masa.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunannya peneliti memang banyak menemukan ragam kendala dan kesulitan, namun berkat niat, usaha dan doa dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan daripada skripsi ini akan jauh sulit dari yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Muslimin Machmud, M.si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada penelitian.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan sumbang bakti keilmuan dan segala bentuk pengabdianya.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengurus administrasi selama masa studi.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jajuli dan Ibunda Nuryanah yang selalu memberi semangat, doa, kasih dan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
8. Saudara tercinta, Ahmad Rifqi Utama, Ahmad Imam Zainal, Ahmad Fadli Kamil yang setia memberi dukungan bagi Penulis.
9. Ibu Raisah Suarni selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
10. Sahabat tercinta, Anjas Dwi Saputra, Reynaldo Kundrat, Ferdi Setya yang selalu menjadi pendengar yang baik dan memberi banyak dukungan bagi Penulis setiap waktu.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah menjadi pribadi yang kuat, sudah mau bertahan disaat merasakan kesulitan dan bersabar menghadapi dinamika kehidupan ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 26 Februari 2025

Ahmad Sahal Alamsyah

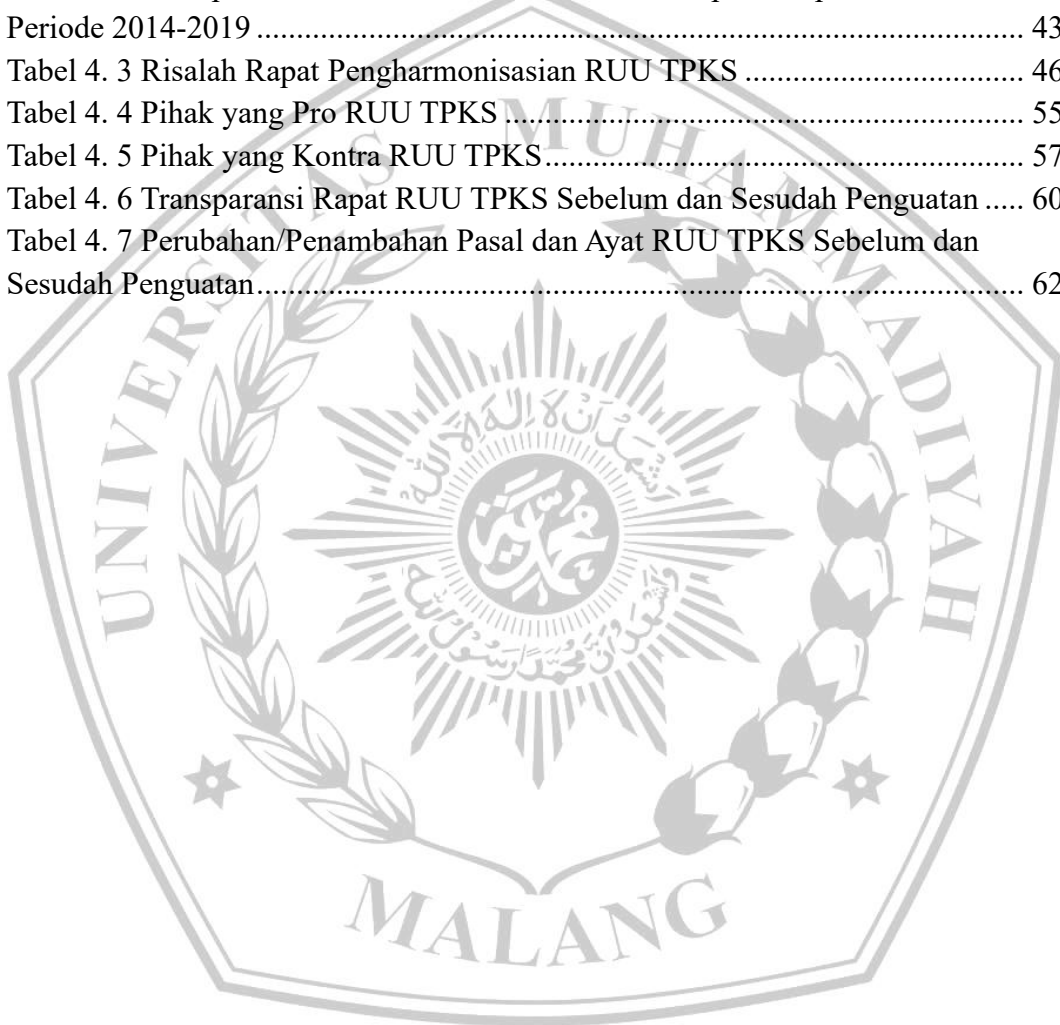
## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Definisi Konseptual .....	8
1.5.1. Teori Peran.....	8
1.5.2. Teori Legislasi.....	9
1.5.3. Badan Legislasi.....	9
1.6. Definisi Operasional .....	10
1.6.1. Penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses Penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual .	10
1.6.2. Faktor penghambat dalam Proses Penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	10
1.7. Metode Penelitian .....	10
1.7.1. Jenis Penelitian .....	10
1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
1.7.3. Sumber Data .....	11
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.....	11

1.7.5. Teknik Analisis Data .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	14
2.2. Teori Peran .....	18
2.3. Teori Legislatif.....	21
2.4. Badan Legislasi .....	27
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH .....</b>	<b>29</b>
3.1. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	29
3.2. Gambaran Umum Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	33
3.3. Tugas dan Wewenang Badan Legislasi DPR RI.....	34
3.4. Struktur Pendukung Badan Legislasi DPR RI.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Peran Badan Legislasi DPR RI dalam Proses Penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	37
4.1.1. Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	37
4.1.2. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	44
4.1.3. Pembahasan, Perubahan, dan Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	54
4.2. Faktor Penghambat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	64
4.2.1. Faktor Internal.....	64
4.2.2. Faktor Eksternal.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kronologi Pembentukan UU TPKS .....	2
Tabel 3. 1 Daftar Fraksi di DPR RI Periode 2019-2024 .....	30
Tabel 3. 2 Komposisi Anggota Badan Legislasi Periode 2019-2024.....	34
Tabel 3. 3 Sekretariat Badan Legislasi DPR RI .....	36
Tabel 3. 4 Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI.....	36
Tabel 4. 1 Urutan RUU TPKS dalam Daftar Prolegnas 2019-2022.....	40
Tabel 4. 2 Transparansi Jumlah Dokumen dan Video pada Rapat RUU TPKS Periode 2014-2019 .....	43
Tabel 4. 3 Risalah Rapat Pengharmonisasian RUU TPKS .....	46
Tabel 4. 4 Pihak yang Pro RUU TPKS .....	55
Tabel 4. 5 Pihak yang Kontra RUU TPKS.....	57
Tabel 4. 6 Transparansi Rapat RUU TPKS Sebelum dan Sesudah Penguatan .....	60
Tabel 4. 7 Perubahan/Penambahan Pasal dan Ayat RUU TPKS Sebelum dan Sesudah Penguatan.....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Badan Legislasi Rapat Panja Penyusunan RUU PKS.....	42
Gambar 4. 2 Rapat Pembahasan Tahap 1.....	54
Gambar 4. 3 Wawancara Dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi .....	65
Gambar 4. 4 Kelomok Keagamaan Melakukan Aksi Demo Menolak RUU TPKS .....	69
Gambar 4. 5 Jaringan Masyarakat Sipil Melakukan Aksi Demo atas Pembahasan RUU TPKS.....	70



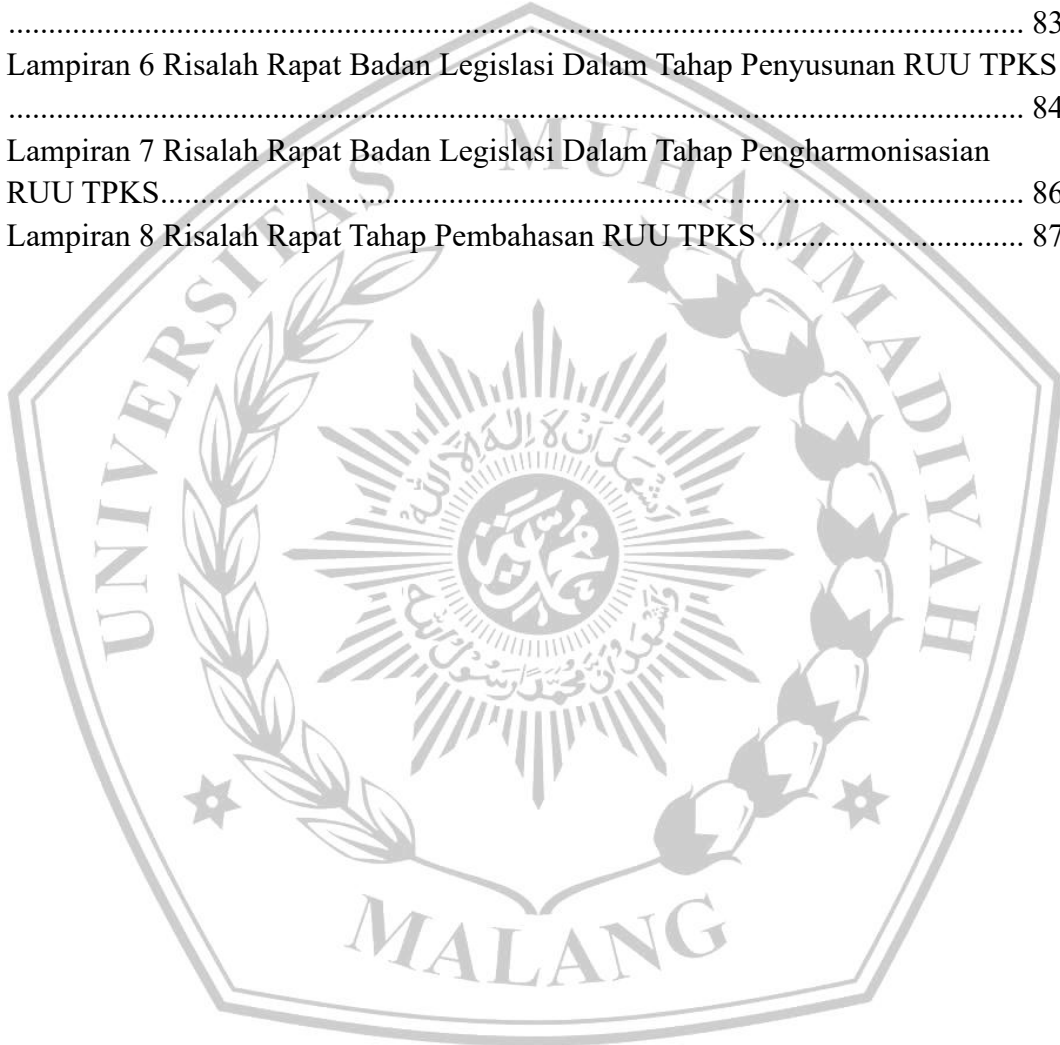
## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Struktur Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024.....	29
Bagan 3. 2 Komposisi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI .....	34
Bagan 4. 1 Tahapan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	79
Lampiran 2 Bahan Rapat RDPU 30 Agustus 2021 .....	80
Lampiran 3 Bahan Rapat RDPU 8 Desember 2021 .....	81
Lampiran 4 Risalah Rapat Badan Legislasi Pembahasan RUU TPKS Dengan Pemerintah.....	82
Lampiran 5 Risalah Rapat Badan Legislasi Rapat Panja Pembahasan RUU TPKS .....	83
Lampiran 6 Risalah Rapat Badan Legislasi Dalam Tahap Penyusunan RUU TPKS .....	84
Lampiran 7 Risalah Rapat Badan Legislasi Dalam Tahap Pengharmonisasian RUU TPKS.....	86
Lampiran 8 Risalah Rapat Tahap Pembahasan RUU TPKS .....	87



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1957). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Anggoman, E. (2019). PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECAHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Lex Crimen*, VIII(3).
- Arifin, Y. (2022). *POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- Arnscheidt, J. (Julia), Rooij, B. van, & Otto, J. M. (2008). *Lawmaking for development : explorations into the theory and practice of international legislative projects*. Leiden University Press.
- Artifani, F., & Mahanani, A. (2022). Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Tugas Akhir*, 2(3). <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asmara, G., Risnain, Muh., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 193–205. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>
- Destiara Hasna Jayanto, Kristina Harefa, & Hayyu Shafa Nur Utami. (2023). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Bingkai Pemberitaan Tirto.id. *Jurnal Audiens*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.3>
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 1, Issue 2).
- Edrisy, I., Dewi, N., Sumartini, N., & Cristiana, E. (2023). Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>
- Fakih, M. (2000). *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freeman, J. (1989). *Women: A Feminist Perspective*. California: Mayfield Publishing Company.

- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- House of Lords Select Committee on the Constitution. (2017). *The Legislative Process: Preparing Legislation for Parliament*. <http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/register-of-lords->
- Kurnia, N. (2004). Representasi Maskulinitas Dalam Iklan. *Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8, 23.
- Kurniawan, T., & Derajat, A. (2022). PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MENGAWAL PENGESAHAN RUU TPKS. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 1(18).
- Kusuma, Agnes, dkk. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review* Vol. 3 No. 1, 56.
- Komisi VIII DPR RI. (2018). Komisi VIII DPR RI, RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual / Ke-2, Dengan Pakar Psikologi (DR. Ikhsan Gumilar dan DR. Bagus Priyono) serta Pakar Kesehatan (Dr. Dewi Inong Irana, SpKK, FINS DV, FAADV). *Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI*, 4.
- Komisi VIII DPR RI. (2018). RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual / Ke-1 Dengan Forum Keagamaan (MUI, PGI, dan WALUBI) serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Laporan Singkat Komisi VII DPR RI*, 2.
- Komisi VIII DPR RI. (2018). RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual/ ke-2 Dengan Pakar Hukum (Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. dan Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H) dan Pakar Sosiologi (Prof. Dr. Ir. EUIS SUNARTI, M.Si). *Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI*, 3.
- Komnas Perempuan. (2013). Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum. Catatan Tahunan *Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*, 1.
- Komnas Perempuan. (2014, April 21). 15 Bentuk Kekerasan Seksua. Retrieved Mei 17, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Komnas Perempuan. (2019, Maret 6). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Retrieved April 27, 2021, from

- Komnas Perempuan. (2020, Maret 10). CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Retrieved Juni 5, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan. (2020, Maret 10). Info Grafis Catahu 2020: Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Retrieved April 27, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan. (2021, Maret 5). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021. Retrieved Juni 5, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, *Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan. (2017). Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: DPR RI.
- Mantalean, V. (2021, Mei 18). Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak. Retrieved Juni 17, 2021, from KOMPAS.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/18/15393881/polisi-sebut-guru-yang-cabuli-murid-di-sebuah-masjid-di-bekasi-seperti?nomgid=1>
- Maulana, G. (2019, Februari 7). Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved Juni 23, 2021, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Nadia, A. (2019, September 23). Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama. Retrieved Juli 3, 2021, from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all#page4>
- Nalle, V. I. W., & Kristina, J. (2020). TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 6(1), 127–149. <https://doi.org/10.25123/vej.3447>

- Narwoko, D. (2004). *SOSIOLOGI TEKS PENGANTAR DAN TERAPAN*. PRENADA MEDIA.
- Nasution, T., Hairini Siregar, N., Luthfiansyah, F. A., Ramadhani, N., Angkat, C. T. D. E., Sihite, R. N., Pohan, D. A., Marunduri, R. A., Panjaitan, M. F., Aulia, R. G., Nasution, M., & Andrika, N. (2023). *PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN*.
- Niko, N. d. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Ilmu Dinamika Sosial Vol. 4 No. 2*, 235.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* (Vol. 4, Issue 2).
- Poerwandari, K. (2006). Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan *Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanggung Jawab*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Saputra, D., & Sahu, aini. (2023). ANALISIS FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PEMBERLAKUAN TRIAS POLITICA. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 350–364. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
- Sarwono, S. (2009). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (E. Suhardono, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK* (Vol. 28, Issue 1).
- Tumuhu, N. (2020). *FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI)*.